

Volume VIII, Nomor 1, Mei 2014 ISSN: 1978-3612

Terbit dua kali setahun, pada bulan Mei dan Desember, berisi tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu ekonomi dalam berbagai aspek kajian

Pemimpin Redaksi:

Maryam Sangadji

Wakil Pemimpin Redaksi:

Yerimias Manuhutu

Redaktur Pelaksana:

Jeann B. Nikijuluw Mohammad R. Serang

Wakil Redaktur Pelaksana:

Bin Raudha Hanoeboen Aziz Laitupa

Tim Editor:

Maria K. Tupamahu Sherly Ferdinandus Mohammad Ridwan Assel

Penyunting Ahli:

Stellamaris Metekohy Latif Kharie Erly Leiwakabessy Asmaria Latuconsina H. Muspida Muhammad Bugis



Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura

Alamat Redaksi

Lt.2 Kampus Fak. Ekonomi Unpatti Jln. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon K.P. 97233, Telp 0911-322579 e-mail: cita.ekonomika@gmail.com

Redaksi menerima sumbangan artikel yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Format artikel harus sesuai dengan petunjuk penulisan yang tercantum di halaman belakang jurnal ini. Naskah yang masuk akan dievaluasi, ditelaah dan disunting untuk menyeragamkan format penulisan, gaya selingkung serta demi menjaga kualitas isi jurnal

PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Oleh : Asmaria Latuconsina Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura

ABSTRACT

This paper aims to obseve the existance of Indonesian Bank (BI) is impotant and necessary needed to create, protect and maintainance efectiveness of monetary policy, inflation rate control, efficiency and secure payment system policy, intermediation banking funds, management of currency in money circulation is influenced by local condition. The development bank financial institution and public attitude activities toward saving grew significantly with the development of demand deposits, time deposits, and foreign currency as well as regular savings. The role of banking institutions as a financial intermediary to make Maluku as a growing region.

Kata Kunci: Banking, Savings, Inflation, Economic Growth

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Bank Indonesia sebagai bank sentral menjalankan fungsi yang kebijakan monoter. fungsi sistem pembayaran serta fungsi pengawasan perbankan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, dan dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, telah berubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung tanggal

31 Desember 2013, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Walaupun fungsi, tugas wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan ke OJK, keberadaan BI di daerah masih dirasakan penting, diperlukan untuk mewujudkan efektivitas kebijakan monoter, pengendalian inflasi, kebijakan sistem pembayaran yang aman dan efisien, intermediasi dana perbankan, hingga pengelolaan peredaran uang kartal yang dipengaruhi oleh kondisi daerah. Berarti BImasih mengemban mandat macropudential, sedangkan mengemban mandat microprudential seperti dijelaskan dalam pasal 7 UU No.

Peran BI di daerah seperti selama ini sudah dilakukan masih perlu tetap dikerjakan bahkan perlu ditingkatkan, peran-peran BI yang masih sangat diperlukan antara lain memberikan saran kepada pemerintah daerah, memfasilitasi informasi data monoter dan data-data makro ekonomi lainnya, pemberdayaan sektor riil dengan dukungan keuangan untuk meningkatkan perekonomian daerah, menata sistem pembayaran yang efisien, mengelola peredaran uang kartal, menjaga stabilitas keuangan daerah, mendorong dan pengenalan akses terhadap perbankan, koordinasi pengendali daerah.

Dalam materi ini, beberapa hasil peranan perbankan dalam memacu perekonomian daerah dan pengendalian inflasi di daerah. dapat dijadikan stimulant bagi pengembangan kinerja Bank Indonesia terhadap perkembangan perekonomian di daerah.

1.2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peranan Bank Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tabungan rill dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku

II. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu persvaratan umum pembangunan ekonomi adalah akumulasi Menurut Suiana (2000:37)akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bahagian atau proporsi pendapatan yang ada di tabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. sehingga meningkatkan pertumvuhan ekonomi. Selanjutnya menurut Suryana (2000:73) bahwa kemauan menabung yang adalah tabungan rill masyarakat ditentukan oleh perkembangan badanbadan keungan, tingkat bunga, dan sikap masyarakat terhadap kegiatan menabung. Dengan kata lain usaha-usaha untuk mempertinggi kemauan menabung haruslah ada penyempurnaan badanbadan dan keadaan keungan perekonomian yang stabil

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskritif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk memberikan gambaran tentang peranan Bank Indonesia dalam perkembangan perekonomian Maluku.

Penelitiaan ini menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan laporan lainnya yang mendukung.

Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa tabulasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

PERANAN BANK DALAM MEMBANGUN TABUNGAN POTENSIAL MENJADI TABUNGAN RIIL DI PROVINSI MALUKU

Setiap perusahan mempunyai karakteristik tersendiri sehingga pengelolaannya harus disesuaikan dengan perusahaan karakteristik bersangkutan.Salah satu karakteristik vang berbeda adalah antara perusahan yang memasarkan produk yang berrupa dengan perusahan memasarkan produk yang berupa jasa.Kedua jenis perusahaan tersebut membutuhkan system pengelolaan yang berbeda, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan, salah satu perusahaan yang memasarkan produk berupa jasa adalah lembaga keuangan Bank. Peranan Bank sebagai lembaga utama intermediasi keuangan (financial intermediary) adalah mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (defisit0 di samping menyediakan jasajasa keuangan lainnya. Oleh karena Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan maka dalam hal ini faktor "kepercayaan" dari masvarakat merupakan faktor utama (Mantond).

Pada tahun 2007 di Provinsi Maluku yang pada saat itu terdiri dari 8 Kabupaten/Kota, baru terdapat 68 buah Bank, yang terdiri dari 1 Bank Indonesia, Bank Pemerintah, 21 Pembangunan Daerah, 10 Bank Swasta dan 3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Total aktiva pada saat itu tercatat Rp. 6.028.307,70 juta. Dana yang dihimpun dalam rupiah dan valuta asing tercatat Rp. 4.365.581,96 juta, posisi Bank Umum tercatat Rp. 1.242.287 juta, simpanan berjangka rupiah dan valuta asing tercatat Rp. 1.018.544,53 juta, sedangkan posisi tabungan tercatat Rp.

2.321.747,39 juta dari 351.194 penabung (Maluku Dalam Angka, 2008).

Pada tahun 2012 jumlah kantor Bank di Maluku meningkat menjadi 138 buah tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Terdiri dari Bank Indonesia 1 buah. Bank Pemerintah 63 buah, Bank Pembangunan Daerah 35 buah. Bank Swasta 28 buah. Bank Syariah 2 Buah, dan BPR 9 buah. Aktiva Bank tercatat meningkat menjadi Rp. 14.596.793 juta, dana yang dihimpun tercatat Rp. 8.486.706 juta. Posisi gira Bank Umum tercatat meningkat meniadi Rp. 2.605.773 juta, simpanan berjangka rupiah dan valuta asing meningkat menjadi Rp. 2.190.991 juta, dan tabungan meningkat menjadi Rp. 4.684.756,00 juta penabung sebanyak (Maluku Dalam Angka, 2013).

Perkembangan dana tabungan rata-20,36% dari tahun 2007-2012, rata laju pertumbuhan penabung dengan 12,37%, signifikan dengan laju pertumbuhan bank rata-rata tiap tahun sebesar 20,6% di Provinsi Maluku. Perkembangan ini sesuai dengan teori pembangunan ekonomi menyatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan kemauan menabung riil adalah perkembangan lembaga keuangan disamping tingkat bunga dan sikap masyarakat terhadap kegiatan menabung (Suryana, 2000: 73).

Kemajuan ini sudah tentu hasil kerja Bank Indonesia perwakilan Ambon yang telah membaca dan mengamati bahwa tingkat tabungan potensial yang adalah kemampuan masyarakat untuk menggerakan tabungan di daerah ini, yang tergantung pada tingkat pendapatan perkapita, distribusi pendapatan, dan kesanggupan sektor perusahan untuk menabung cukup tinggi. Hal ini terlihat dari simpanan gira yang meningkat ratarata 22% dan simpanan berjangka rupiah dan valuta asing yang meningkat rata-rata 23% setiap tahun selama kurun waktu 2008 – 2012.

KREDIT PERBANKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MALUKU

Kredit Perbankan

Dana yang dihimpun oleh lembaga perbankan di Maluku seperti dijelaskan sebelumnya, kemudian disalurkan berupa kredit untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi. Pada tahun 2007 posisi kredit perbankan rupiah dan valuta asing tercatat Rp. 1.575.763,23 juta, berarti meningkat 48,4% dari tahun sebelumnya, posisi kredit ini 92,73% disalurkan oleh Bank-Bank Pemerintah dan disalurkan oleh Bank-Bank swasta. Dari kredit tersebut 60,74% diperuntukan bagi kredit usaha mikro (s/d Rp. 50 juta), 20,88% untuk kredit kecil (Rp. 50 juta – Rp. 500) dan kredit usaha menengah (Rp. 500 juta – Rp. 5 Miliar) 18,38%. Di dalam kredit mikro 34,28% diperuntukan bagi kredit usaha kecil (KUK), berarti kebijakan penyampaian kredit diprioritaskan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah.

Penyaluran kredit menurut sektor ekonomi oleh Bank Pemerintah terdiri dari sektor pertanian 1%, sektor perindustrian 0,14%, sektor konstruksi 9,1%, sektor perdagangan hotel dan restoran 16,43%, sektor pengangkutan jasa-jasa dunia usaha 0,61%, dan lain-lain 71,75%.

Pada tahun 2012, posisi kredit perbankan rupiah dan valuta asing tercatat Rp. 6.844.187,00 juta, berarti terjadi peningkatan rata-rata tiap tahun sebesar 67%, posisi kredit pada tahun 2012 ini, 73,24% disalurkan oleh Bank Pemerintah dan 26,74% disalurkan oleh Bank-bank Swasta. Berarti terjadi peningkatan penyediaan kredit oleh Bank-bank Swasta. Pada tahun 2012 presentase kredit untuk usaha mikro turun menjadi 57,27%, sedangkan prosentase

untuk kredit kecil dan kredit menengah meningkat menjadi 25,63% dan 22,29%.

Kredit dari Bank-bank Pemerintah pada tahun 2007 disalurkan bagi sektor pertanian 1%, sektor perindustrian 0,14%, sektorrr konstruksi 9,1%, sektor perdagangan hotel dan restoran 16,43%, sektorr pengangkutan dan komunikasi 0,87%, jasa-jasa dunia usaha 0,61% dan lain-lain 71,75%. Sedangkan pada tahun 2012 sektor pertanian mendapat alokasi 1,2%, sektor perindustrian naik menjadi 0,7%, sektor konstruksi turun menjadi 6,5%, sektor perdagangan, hotel dan restoran naik menjadi 19%, sektor pengangkutan turun menjadi 0,7%, jasajasa dunia usaha turun menjadi 0,43%, dan lain-lain turun menjadi 66,74%.

PDRB dan Laju Pertumbuhannya

Dilihat dari kontribusi dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, Maluku adalah daerah berkembang karena kontribusi PDRB Maluku pada tahun 2012 terendah terhadap nasional, tapi mempunyai laju pertumbuhan tinggi (7,81%) lebih tinggi dari pertumbuhan nasional (6,30%).

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku setiap tahun dari 2007-2012 sebesar 6,8% diatas nasional 6,5%.

Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2007-2012 menurut sektor ekonomi seperti Nampak pada table berikut:

Table 1 Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 – 2012

Lapangan Usaha		2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	35,32	34,35	33,04	31,73	29,30	28,63
II.	Pertambangan dan penggalian	0,76	0,75	0,74	0,73	0,78	0,76
III.	Industry pengolahan	4,72	4,71	4,76	4,50	4,43	4,53
IV.	Listrik, gas dan air	0,77	0,74	0,56	0,54	0,54	0,50
V.	Bangunan	1,36	1,32	1,33	1,89	1,95	1,94
VI.	Perdagangan, hotel dan restoran	26,34	27,45	28,51	28,93	28,27	28,71
VII.	Pengangkutan dan komunikasi	9,29	9,15	9,05	9,33	10,22	10,01
VIII.	Keuangan persewaan dan jasa perusahan	4,95	4,86	4,72	4,48	4,22	4,00
IX.	Jasa-jasa	16,56	16,67	17,28	17,81	19,80	20,93
PDRB		100	100	100	100	100	100

Dari table tersebut Nampak bahwa kontribusi sektor pertanian terus menurun sedangkan sektor jasa-jasa mulai dari jasa perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya mengalami peningkatan kontribusi. Hal ini bukan karena output sektor pertanian mengalami penurunan, tetapi karena laju pertumbuhan output sektor pertanian lebih lambat disbanding laju pertumbuhan output sektor-sektor jasa-jasa dimaksud.

Apabila kita hubungkan dengan distribusi kredit perbankan seperti dijelaskan di atas Nampak pada pertumbuhan sektor ekonomis rata-rata tiap tahun seperti Nampak pada table berikut

Table 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Setiap Tahun Dari 2007 – 2012 Menurut Harga Konstan

	Sektor Ekonomi	Laju Pertumbuhan (%)
I.	Pertanian, peternakan, kehutanan, dan	4,8
	perikanan	
III.	Industry pengolahan	5,9
V.	Konstruksi	19,1
VI.	Perdagangan, hotel dan restoran	71,8
VII.	Pengangkutan dan komunikasi	7,14
VIII.	Keuangan persewaan dan jasa	4,2
	perusahan	
IX.	Jasa-jasa	8,6
	Rata-Rata Provinsi	6,8

Bila table 1 dan 2 dihubungkan dengan alokasi kredit, dapat dijelaskan bahwa sektor pertanian mendapat alokasi rendah karena kredit walaupun kontribusinya besar terhadap PDRB tetapi laju pertumbuhan ekonominya dibawah rata-rata provinsi. Sedangkan sektor industry pengolahan mendapat alokasi kredit rendah karena kontribusi terhadap PDRB rendah dan pertumbuhan sektornya dibawah ratarata.Jadi sektor industry pengolahan adalah sektor ekonomi tertinggal dalam pembangunan ekonomi Maluku.Sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dapat digolongkan kedalam sektor ekonomi maju karena kontribusi terhadap PDRB besar dan laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. karena itu sektor-sektor ini wajar bila mendapat alokasi kredit besar.

PERKEMBANGAN INFLASI DAN INDEKS HARGA KONSUMEN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN AKUMULASI TABUNGAN

merupakan Inflasi fenomena ekonomi vang selalu menarik untuk dibahas terutama berrkaitan dengan dampaknya terhadap yang luas makroekonomi agregat seperti pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga sangat berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal. Tingkat harga merrupakan opportunitycost bagi masyarakat dalam memegang (holding) asset financial. Semakin tinggi perubahan tingkat harga, maka makin tinggi pula opertunity cost untuk memegang asset finansial. Artinya masyarakat akan merasa beruntung jika memegang asset dalam bentuk riil dibanding asset finansial bila harga tinggi. Jika asset finansial luar negeri

dimasukan sebagai salah satu pilihan asset, maka perbedaan tingkat inflasi dalam negeri dan internasional dapat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing *overvalued* dan pada gilirannya akan menghilangkan daya saing komoditas Indonesia.

Untuk kepentingan mobilisasi dana dalam negeri, perbedaan tingkat inflasi akan menyebabkan timbulnya ekspektasi masyarakat terhadap terjadinya devaluasi dan mendorong timbulnya pelarian modal ke luar negeri. Inflasi merupakan variable penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, dimana dua variable terakhir merupakan variable penting dalam menentukan pertumbuhan dalam sektor produksi.

Kenaikan tingkat harga (inflasi) yang tinggi dapat menyebabkan :

- Memburuknya distribusi pendapatan
- Berrkurangnya tabungan domestic yang merupakan sumber dana investasi
- Terjadinya deficit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri, dan
- Timbulnya ketidakstabilan politik

Inflasi kumulatif di Kota Ambon tahun 2007 tercatat 5,85% dengan indeks harga konsumen Desember 2007 tercatat 143,87, jauh lebih rendah dari nasional sebesar 6,59% dengan indeks harga konsumen 155,50.

Laju inflasi tahun 2007 – 2012, laju pertumbuhan ekonomi dari tingkat tabungan tahun 2007 – 2012 seperti Nampak pada table berikut :

Table 3 Laju Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Tabungan Tahun 2007 – 2012

Tahun	Laju Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi	Tabungan Nasional	Prosentase Kenaikan (%)
2007	5,85	5,62	2.321.747	-
2008	9,34	4,23	2.405.855	3,62
2009	6,48	5,44	2.707.703	12,55
2010	8,78	6,47	2.997.745	10,71
2011	2,85	6,06	3.892.931	29,87
2012	6,73	7,81	4.684.756	20,34

Sumber: Maluku Dalam Angka, 2008 dan 2013

Dari tabel tersebut di atas Nampak bahwa bila inflasi tinggi laju pertumbuhan ekonomi akan terganggu, begitupun juga tabungan masyarakat.

Analisis di atas dibuat dalam kurun waktu dimana Bank Indonesia masih menjalankan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, dimana terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang tersebut telah dialihkan ke Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) karena alasan peningkatan efisiensi.

Dari data-data perkembangan perekonomian daerah nampak bahwa peran Bank Indonesia di daerah Maluku dalam pengendalian monoter, neraca perdagangan, pemberdayaan sektor riil dan keuangan untuk mendukung perekonomian daerah, menjaga system pembayaran yang efisien, mengelola peredaran uang kartal, menjaga stabilitas keuangan daerah, mendorong akses

masyarakat terhadap perbankan, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), riset perekonomian daerah perlu di optimalkan.

Pada Desember 2013 Kota Ambon mengalami inflasi 1,51% dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 153,14 dari 66 kota di Indonesia. IHK Kota Ambon menduduki peringkat 20, inflasi bulanan Kota Ambon menduduki peringkat 4, inflasi tahunan tahun kalender menduduki peringkat 19, inflasi terjadi pada 6 kelompok pengeluaran, tertinggi pada kelompok bahan makanan sebesar 5,04%, inflasi Desemberr 2013 terhadap Desember 2012 sebesar 8,81% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6,73%.

Pada bulan Februari 2014, Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,85% dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 109,50 sedangkan inflasi Kota Tual tercatat 1,46% dengan IHK 115,33.

Dari 82 Kota IHK di Indonesia di bulan Februari 2014, IHK Kota Ambon menduduki peringkat 66, inflasi bulanan Kota Ambon menduduki peringkat 11, inflasi tahun kalender Kota Ambon menduduki peringkat 20 dan untuk inflasi dari tahun ke tahun Kota Ambon menduduki peringkat 18, sedangkan pada bulan yang sama IHK Kota Tual menduduki peringkat 7, inflasi bulanan Kota Tual menduduki peringkat 4, inflasi tahun kalender Kota Tual menduduki peringkat 6 serta inflasi tahun ke tahun Kota Tual menduduki urutan ke 5.

Komoditi yang dominan menyumbang inflasi di Kota Ambon adalah ikan layang (momar) angkutan udara, kacang panjang, kangkung, dan ikan cakalang. Sedangkan di Tual penyumbang inflasi yang paling besar adalah ikan teri, telur ayam ras, ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan kangkung. Ini tidak lain karena supply barang terbatas dihadapkan dengan permintaan besar.

Kesimpulan

Perkembangan lembaga keuangan Bank dan sikap masyarakat terhadap kegiatan menabung telah membuat tabungan potensial menjadi tabungan riil dilihat dari perkembangan simpanan gira, simpanan berjangka rupiah dan valuta asing maupun tabungan.

Peranan lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan menjadikan daerah Maluku sebagai daerah berkembang. Diharapkan peranan lembaga perbankan lebih ditingkatkan lagi agar daerah Maluku bisa meningkat menjadi daerah potensial, bahkan bisa naik menjadi daerah maju.

Laju inflasi yang tinggi jelas berdampak pada laiu pertumbuhan ekonomi pertumbuhan dan laiu mobilisasi tabungan, dan selanjutnya berdampak pada investasi.Pemicu inflasi di daerah ini paling besar karena hargaharga bahan makanan. Bank Indonesia sebagai coordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian riset perekonomian daerah diharapkan lebih ditingkatkan untuk kemajuan daerah ini.

- 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku "Maluku Dalam Angka, 2008
- 2. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku "Maluku Dalam Angka, 2013
- 3. Martono, 202, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekomsia, Yogyakarta
- 4. Suryana, 2000, "Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan, Salemba Empat, Jakarta.

5.